

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2020. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 yaitu : *“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan “*

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya dukung lingkungan hidup yang berkualitas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2018 yang ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
 13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau no 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Berau

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2020 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan suatu kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 01 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember

2020 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja anggaran SKPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dibidang pengendalian dampak lingkungan serta mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakanserta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD

Rencana Kerja DLHK Kabupaten Berau adalah penjabara perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DLHK tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DLHK Kabupaten Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Berau selama tahun lalu dan perkiraan target tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa Dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2018

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, Pada Anggaran tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 121.780.545.000 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 9.126.850.000

2. Belanja Langsung = Rp. 112.653.695.000

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 8 (delapan) Program dan 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel

Belanja Tidak Langsung

No	uraian	Anggaran		Capaian %
		target	Realisasi	
1	Belanja tidak langsung	9.126.850.000	7.965.535.021	87

Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2018 dengan rata-rata serapan realisasi keuangan sebesar 87 % jika diukur dengan skala penilaian maka untuk realisasi belanja tidak langsung pada skala nilai 80 > 100 kategori penilaian baik

Belanja langsung

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	7.082.362.400	6.434.057.639	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	1.500.000	1.500.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	213.000.000	165.723.120	77
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan	Rp	2.045.000.000	1.863.734.403	91

	Dinas/Operasional				
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	140.604.000	129.148.000	91
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000	9.229.200	92
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	25.000.000	24.848.000.	99
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	25.000.000	13.670.000	54
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	30.000.000	21.938.400	73
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000	5.877.000	73
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	4.955.000	99
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	45.000.000	25.214.900	56
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	260.000.000	255.891.800	98
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	65.000.000	64.632.000	99
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.209258.400	4.137.331.150	98
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	514.000.000	441.925.400	

15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	Rp	500.000.000	431.660.000	86
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	14.000.000	10.265.400	73
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	150.000.000	144.150.000	
17	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000	144.150.000	96
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	5.000.000	4.970.000	
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	5.000.000	4.970.000	99
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Rp	7.736.366.000	7.102.557.150	
19	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	3.621.061.000	3.326.447.650	91
20	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.115.305.000	3.776.109.500	91
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	91.360.491.600	1.635.154.691	
21	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	133.000.000	120.112.782	90

22	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	430.273.000	369.815.000	85
23	Koordinasi pengelolaan program LH (rakorda PPLH)	Rp	96.000.000	95.940.000	99
24	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	85.680.000	79.201.600	92
25	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	125.300.000	122.158.510	97
26	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	115.000.000	64.343.021	55
27	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Rp	110.500.000	102.942.900	93
28	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	132.867.600	99.734.226	75
29	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	131.871.000	123.256.969	93
30	Penanaman di pesisir/pantai (DBH)	Rp	47.790.000.000	0	0
31	Penanaman bamboo kanan kiri sungai (DBH)	Rp	10.000.000.000	85.216.000	0,8
32	Pembibitan (DBH)	Rp	21.720.000.000	155.814.368	0,7
33	Penanaman di sepadan danau dan daerah tangkapan air (DBH)	Rp	10.420.000.000	216.619.315	2,07
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Rp	416.006.000	377.150.425	

	Hidup				
34	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	126.250.000	100.267.325	79
35	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	112.100.000	106.070.800	94
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	114.656.000	114.143.000	99
38	Penanganan Kasus LH	Rp	63.000.000	56.669.300	90
IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	5.389.469.000	5.131.443.287	
39	Penataan RTH	Rp	2.024.779.000	1.869.205.235	92
40	Pemeliharaan RTH	Rp	3.364.690.000	3.262.238.052	96
	<i>Jumlah Belanja Langsung</i>	<i>Rp</i>	112.653.695.000	21.561.343.926	

Realisasi belanja langsung pada tahun 2018 dengan rata-rata serapan realisasi fisik sebesar 69 % sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 19 %, jika diukur dengan sekala penilaian maka untuk realisasi fisik belanja langsung pada sekala nilai 60 > 80 kategori penilaian cukup sedangkan untuk realisasi keuangan belanja langsung pada sekala nilai < 55 kategori penilaian kurang, secara keseluruhan penilaian sudah dianggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, yang menjadi permasalahan penyerapan anggaran keuangan dan fisik untuk kegiatan yang berasal dari dana (DBH) DR tidak dapat dilaksanakan keseluruhan sebab dana tersebut masuk pada semester dua dan akan

dilakukan pembahasan dengan kementerian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang tidak di setujui untuk dilaksanakan kemudian juga terkendala masalah pelelangan serta lokasi penanaman.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020

Sedangkan untuk tahun Anggaran 2020 dengan usulan sebesar Rp. 29.925.000.000,- sedangkan anggaran terurai dalam 9 program dan 48 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada DLHK Kabupaten Berau Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum cukup memadai dan juga pengetahuan dan ketrampilan terutama dibidang keahlian tertentu dari masing-masing personil, kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada serta kurangnya tenaga Laboratorium sehingga belum beroperasi.

b. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan DLHK Kabupaten Berau

c. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir dan sarana laboratorium yang masih belum memadai terutama dalam pengujian hasil.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan DLHK melalui pendidikan serta diklat yang diikuti oleh semua staf setiap tahunnya, fungsional maupun tenaga teknis. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahkan:
 - 1) Seksi Kebersihan;

- 2) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 3) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Golongan					Pendidikan						
	IV	III	II	I	Jumlah	S2	SI	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	1		1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Kabid	4	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	4

Kepala UPT Leb		1			1		1					1
kasi		12	-	-	12		11	1	-	-	-	12
Subbag	-	4	-	-	4	1	2	1		-	-	4
Staf	-	11	28	18	57		6	3	25	9	14	57
Honor	-	-	-	-	336	-	-	-	-	-	-	336
Total	6	28	28	18	393	4	28	7	38	6	16	393

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2018

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Yang Tersusun Dengan Kriteria Gender.

No	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kabid	3	1	4
4	Kepala UPT Leb	1		1
4.	Kasi	9	3	12
5.	Kasubbag	3	1	4
6.	Staf	48	9	57
7.	Honor	260	76	336
Total				393

Sarana dan prasarana pendukung

No.	Sarana Kerja	Jumlah
1.	Gedung Kantor	4 Bangunan
2.	Kendaraan roda 4	10 unit
3.	Kendaraan roda 2	13 unit
4.	Excavator	2 Unit
5.	Well loder	1 unit
6.	Kendaraan roda 6	21 unit
4.	pH Meter	1 unit
5.	TDS meter	1 unit
6.	AAS	1 Unit
7.	AC	10 Unit
8.	Laptop/Note Book	5 unit
9.	Komputer (PC)	19 unit
10.	Handy Cam	1 unit
11.	Printer	19 unit
12.	Telephone (PABX)	1 unit
13.	Faksimile	1 unit
14.	TV	6 Unit

15.	Sound System	2 Unit
16.	Meja kerja	66 Unit
17.	Sofa	1 set
18.	Alat-alat Laboratorium LH	1 paket
19.	Kursi dan meja Ruang Rapat	50 kursi dan 10 meja panjang

Tugas Pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau

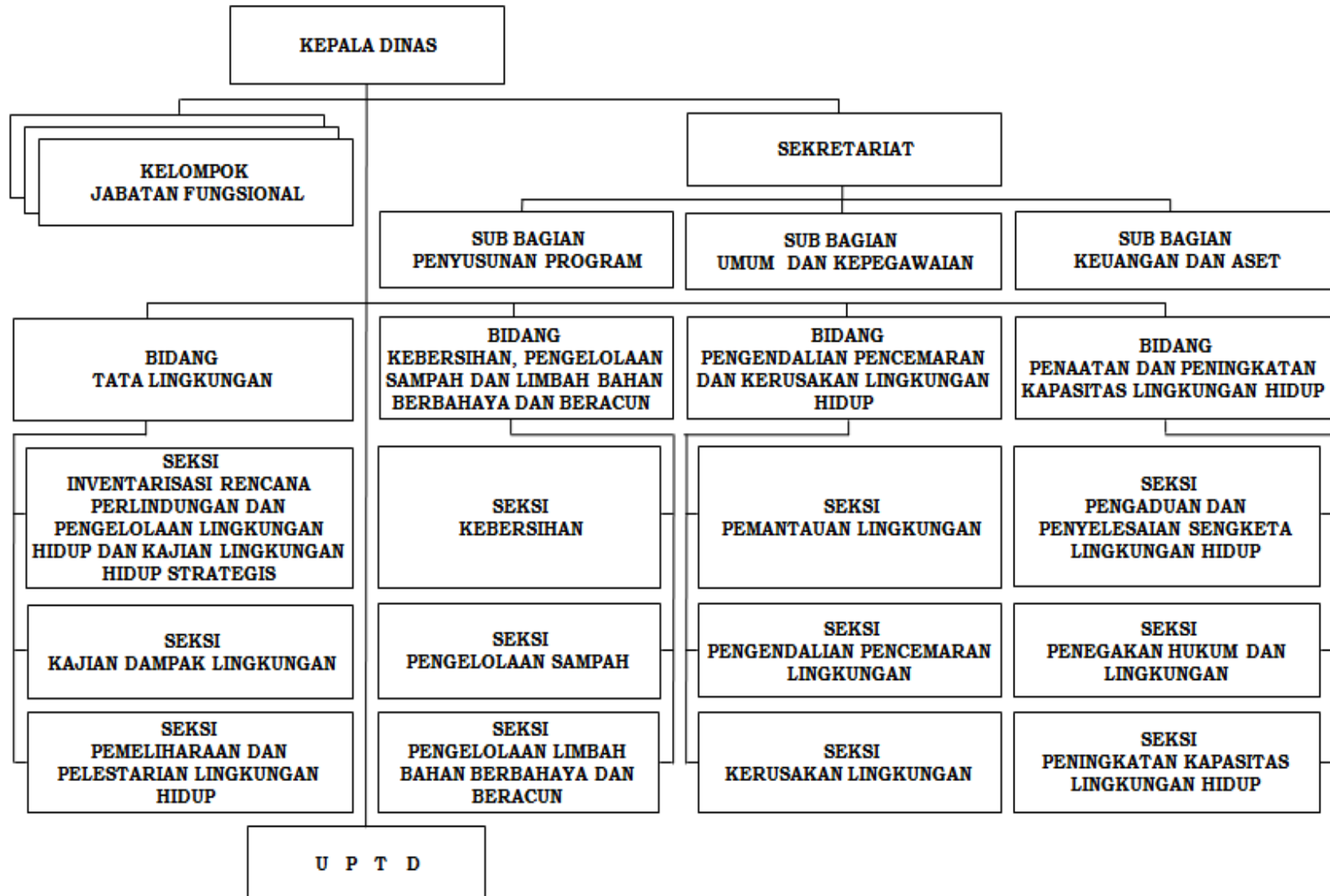
Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan UPTB.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi



BAB III

TELAAHAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterkaitan Kegiatan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No	Kebijakan		
	Kabupaten	Propinsi	Pusat
1	SPM Lingkungan Hidup	SPM Lingkungan Hidup	SPM Lingkungan Hidup
2	Program Adipura	Program Adipura	Program Adipura
3	Program Adiwiyata	Program Adiwiyata	Program Adiwiyata
4	Program Pembangunan Hutan Kota	Program Pembangunan Hutan Kota	Program Pembangunan Hutan Kota
5	SLHD	SLHD	SLHD
6	Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
7	Meningkatkan Pemantauan Kualitas Air sungai dan Udara	Meningkatkan Pemantauan Kualitas Air sungai dan Udara	
8	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3	
9	Keikutsertaan Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Keikutsertaan Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Keikutsertaan Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional
10	Pemantauan pengawasan pengendalian dampak Lingkungan Perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan	Pemantauan pengawasan pengendalian dampak Lingkungan Perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan	

12	Peningkatan peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA		
----	--	--	--

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan, oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja DLHK Kabupaten Berau Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, Kabupaten Berau, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Berau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, Badan Lingkungab Hidup Kabupaten Berau melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Berau

M i s i

Untuk mewujudkan misi Pemerintahan Kabupaten Berau yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan haruslah mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan misi membawa organisasi pemerintahan kepada satu fokus sekaligus merupakan tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (*action plan*) perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.

Untuk merealisasikan visi tersebut di atas, serta berdasarkan pada misi ke satu Kepala Daerah terpilih yaitu ” ***membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan***” ,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstr SKPD dalam hal ini Renstra DLHK Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan memacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui

program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* tersebut harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun arahan tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Dari delapan arahan tujuan dan sasaran yang ada pada Restra Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan termasuk dalam poin ke satu yaitu : mempertahankan kualitas lingkungan hidup, sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan mempertahankan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi kesatu adapun sasaran yaitu : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indicator: terjaganya kualitas air sungai; Terjaganya kualitas udara, menurunnya intensitas emisi GRK.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana kerja tahunan diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing – masing sasaran yang harus dicapai. Sedangkan target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Dalam Rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan dalam rencana strategis perlu ditetapkan target indikator kinerja utama

dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup daerah dan membantu Bupati Berau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup program dan kegiatan yang dirancang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2020 terdiri dari :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN 2020
KABUPATEN BERAU

Kode					Uraian program/kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja				Pagu indicator (2020)		OPD bertanggung jawab
							Program/outcome		Kegiatan/output		Kegiatan	Program	
							uraian	target	uraian	target			
2	5				Urusan Wajib								DLHK
2	5	1			Bidang urusan Lingkungan Hidup							29,925,000,000	
2	5	1	1		Program pelayanan adminitrasi perkantoran		Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	90%				7,968,000,000	
2	5	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tanjung Redeb			Jumlah surat	1000 surat	3,000,000		
2	5	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tanjung Redeb			Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	4 jenis	250,000,000		
2	5	1	1	6	Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Tanjung Redeb			Tersediannya biaya oprasional dan perawatan kendaraan dinas	50 unit	2,530,000,000		
2	5	1	1	7	Penyediaan jasa atministrasi keuangan	Tanjung Redeb			Tersediannya honor pengelola keuangan	12 orang	200,000,000		
2	5	1	1	8	Penyedia jasa kebersihan kantor	Tanjung Redeb			Tersedianya jasa kebersihan	5 buah	30,000,000		
2	5	1	1	9	Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor	Tanjung Redeb			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	30 unit	80,000,000		
2	5	1	1	10	Penyediaan ATK	Tanjung Redeb			Tersedianya ATK	10 jenis	20,000,000		

2	5	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Redeb			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	10 jenis	40,000,000		
2	5	1	1	12	Penyediaan komponen intalasi listrik	Tanjung Redeb			Tersedianya peralatan listrik	2 jenis	35,000,000		
2	5	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Redeb			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	120,000,000		
2	5	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Redeb			Tersedianya surat kabar dan majalah	5 surat kabar/majalah	15,000,000		
2	5	1	1	17	Penyediaan makan dan minum	Tanjung Redeb			Tersedianya makan dan minum rapat/tamu	108 porsi	80,000,000		
2	5	1	1		Penyediaan makan dan minus pegawai	Tanjung Redeb			Tersedianya makan dan minum pegawai	116 porsi	15,000,000		
2	5	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi luar daerah	Luar kab. Berau			Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah	25 kali	300,000,000		
2	5	1	1	19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Tanjung Redeb			Tersedianya belanja perjalanan dinas daerah	50 kali	150,000,000		
2	5	1	1	20	Penyediaan jasa adminitrasi teknis perkantoran	Tanjung Redeb			Terbayarnya honor PTT	117 orang	4,100,000,000		
2	5	1	2		Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana dangan kondisi baik pada unit kerja internal	90%				420,000,000	
2	5	1	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/oprasional roda 2	Tanjung Redeb			Tersedianya kendaraan dinas	5 unit	80,000,000		
2	5	1	2	10	Pengadaan mebeler	Tanjung Redeb			Tersedianya mebeller sesuai dengan kebutuhan	3 jenis	40,000,000		
2	5	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Tanjung Redeb			Terjaganya gedung/kantor	4 unit	300,000,000		

2	5	1	15	3	Pengembangan masterlan persampahan	kab. Berau			Tersusnya dokumen masterplen persampahan	1 dokumen	1,800,000,000		
2	5	1	15	5	Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	luar kab berau			tersedianya mesin teknologi persampahan	6 unit	2,000,000,000		
2	5	1	15	18	Penanganan sampah pada permukaan jalan dan saluran drainase kota	kec tanjung redeb,sambaliung,teluk bayur, gung tabur			Tertanganinya sampah pada permukaan jalan dan saluran drainase kota	100 orang	4,400,000,000		
2	5	1	15	19	Peningkatan kemiteraan dan penyediaan informasi publik	Tanjung Redeb			Jumlah kemiteraan	2 kemiteraan	200,000,000		
2	5	1	15	20	Penanganan sampah pada alur sungai/daerah aliran sungai	sungai seghah, kelay			Tertanganinya sampah pada alur sungai/daerah aliran sungai	10 KM	200,000,000		
2	5	1	15	21	pengelolaan dan pengembangan bank sampah	Tanjung Redeb			bangunan bank sampah	6 bank sampah	2,000,000,000		
2	5	1	16		Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH		Indek Pencemaran air	< 5				2,370,000,000	
2	5	1	16	3	Pemantauan kualitas lingkungan Hidup	13 kecamatan			Data indeks kualitas lingkungan hidup (Udara,Air dan Tutupan Lahan) Kab.Berau	1 Dokumen	500,000,000		
2	5	1	16	7	Pengkajian dampak lingkungan	13 kecamatan			Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan / SPPL	100 dokumen	200,000,000		
										bimtek 1 kali			

2	5	1	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH	kec tanjung redeb,sambaliung,teluk bayur, gung tabur			lomba kebersihan antar kelurahan	4 kecamatan	420,000,000		
									penilaian Adipura	2 kali			
2	5	1	16	21	Pemantauan Kerusakan LH	Kab. Berau			jumlah usaha/kegiatan dilakukan pengawasan	27 perusahaan	200,000,000		
2	5	1	16	22	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Kab. Berau			Data hasil pengawasan pelaku usaha	20 pelaku usaha	200,000,000		
2	5	1	16	23	Pengawasan pengelolalaan limbah B3	Kab. Berau			Terkendalinya pengelolaan LB3 oleh pelaku usaha	24 pelaku usaha	200,000,000		
2	5	1	16	24	Pemantauan Kualitas air sungai	Kab. Berau			terlaksananya pemantauan air sungai	3 sungai	250,000,000		
2	5	1	16	26	Fasilitas laboratorium lingkungan hidup	Kab. Berau			sertifikat hasil uji	10 sertifikat	200,000,000		
2	5	1	16	29	Pemantauan evaluasi laporan emisi gas rumah kaca (GRK)	Kab. Berau			data emisi gas rumah kaca (GRK) berbasis lahan	414.000 ton Co2 eq	200,000,000		
2	5	1	17		Program pelindungan dan konservasi sumber daya alam		meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kawasan konservasi	2 kecamatan				200,000,000	
2	5	1	17	19	Pelindungan dan konservasi kawasan karst berau	Kec. Kelay dan Biduk-Biduk			Sosialisasi dan Edukasi nilai penting KARST kepada Masyarakat	2 Kali	200,000,000		
2	5	1	19		Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH		Jumlah informasi LH yang terupdate	2 dokumen				640,000,000	

2	5	1	19	1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	sekolah Kab. Berau			Jumlah sekolah yang mendapatkan adiwiyata	2 sekolah	200,000,000		
2	5	1	19	2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kab. Berau			Tersusunnya buku Laporan IKPLHD dan RPPLH	2 Dokumen	40,000,000		
2	5	1	19	7	Pekan lingkungan hidup	Kab. Berau dan luar kab berau			Terselenggaranya PLH	2 even	200,000,000		
2	5	1	19	8	Penanganan kasus LH	Kab. Berau			laporan hasil penanganan kasus lingkungan	5 kasus	200,000,000		
2	5	1	24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau		luasan RTH	48.598 M2				6,497,000,000	
2	5	1	24	5	Penataan RTH	Kab. Berau			Penataan RTH	7 lokasi	2,497,000,000		
2	5	1	24	6	Pemeliharaan RTH	Kab. Berau			Pemeliharaan RTH	4 Kecamatan	4,000,000,000		

Kepala DLHK

H. Sujadi, A.Pi
NIP. 19631121 199003 1 004

PENUTUP

Rencana Kerja diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan diharapkan dapat memaksimalkan persentase Program dan Kegiatan yang ada di DLHK Kabupaten Berau sampai dengan akhir Restra tahun 2021.

Output Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah Program Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada DLHK Kabupaten Berau tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih lagi, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Berau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan	3
1,4 Sisitem matis penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu	5
2.2 Analisa kinerja pelayanan SKPD	13
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan sasaran renja SKPD	23
3.3 Program dan kegiatan	25
BAB IV PENUTUP	32

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kharunia Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja SKPD-DLHK) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan pada waktunya Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020. Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan. Akhir kata semoga Renja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

**Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan**

**H. Sujadi, A.Pi
NIP. 19631121 199003 1 004**

**RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
TAHUN 2020**



**KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019**

Lampiran